

EVALUASI KEBIJAKAN RUSUNAWA DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA MALANG

Adnin Ridha Rerifki, Dody Setyawan, Asih Widi Lestari

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: adninyakusa@gmail.com

Abstract: Increasing population in Malang every year is accompanied by increased need for shelter and limited land with low economy causing the emergence of slums. So the Government of Malang City issued Rusunawa policy as a derivative policy on it. In this study using qualitative research methods with the steps of data collection is done through observation, interview and documentation with informants through snowball technique. To measure the validity of data validity is done an examination technique based on degree of trust and certainty of research object by using triangulation of source. From that step then analyzed by using data analysis model of Sugiyono theory (2011: 247-252) which include Data Reduction process, Data Presentation, and Drawing Conclusion. From the research, it has been found that: (1) Rusunawa policy in Malang City has succeeded in preventing the slum settlement in Malang, but has not been successful in overcoming slum settlement in Malang. In addition, the sanctions are so extreme it also helped trigger the re-emergence of slums in Malang. (2) Rusunawa policy support factor in Malang City is the participation and support from some people of Malang City, besides the existence of fund support from government of Malang City every year in terms of management of Rusunawa. (3) Inhibiting factors are limited land and the living pattern of some people who are less aware of cleanliness, in addition to the lack of funds in the budget of Malang City Rusunawa and promises fund disbursement from the central government is not liquid, and also the lack of participation of some communities who have long Inhabiting residence in slum areas with a variety of specific reasons greatly hampered the success of Rusunawa policy in addressing slum settlements in Malang.

Keywords: Rusunawa Policy, Slum Residential in Malang City

Abstrak: Bertambahnya penduduk di Kota Malang setiap tahun diiringi dengan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan keterbatasan lahan dengan rendahnya perekonomian menyebabkan timbulnya permukiman kumuh. Maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan Rusunawa sebagai kebijakan turunan di atasnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan melalui teknik snowball. Untuk mengukur validitas keabsahan data dilakukan suatu teknik pemeriksaan didasarkan pada derajat kepercayaan dan kepastian atas obyek penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber. Dari langkah itu kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisa Miles dan Huberman yang meliputi proses Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Dari penelitian yang dilaksanakan telah diperoleh suatu kesimpulan: (1) Kebijakan Rusunawa di Kota Malang telah berhasil mencegah adanya permukiman kumuh di Kota Malang, akan tetapi belum terlalu berhasil dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang. Selain itu sanksi yang begitu ekstrim justru turut memicu timbulnya kembali permukiman kumuh di Kota Malang. (2) Faktor pendukung kebijakan Rusunawa di Kota Malang ialah adanya partisipasi dan dukungan dari sebagian masyarakat Kota Malang, selain itu adanya dukungan dana dari pemerintah Kota Malang setiap tahun dalam hal pengelolaan Rusunawa. (3) Faktor penghambat ialah keterbatasan lahan dan pola hidup sebagian masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan, selain itu kurangnya dana APBD Kota Malang dalam pembangunan Rusunawa dan janji kucuran dana dari pemerintah pusat tidak cair, dan juga kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat yang sejak lama telah mendiami tempat tinggal di kawasan permukiman kumuh dengan berbagai alasan tertentu sangat menghambat keberhasilan kebijakan Rusunawa dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang.

Kata Kunci: Kebijakan Rusunawa, Permukiman Kumuh di Kota Malang

PENDAHULUAN

Bertambahnya penduduk di Kota Malang setiap tahun diiringi dengan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan keterbatasan lahan disertai dengan rendahnya perekonomian menyebabkan timbulnya permukiman kumuh. Maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan kebijakan Rusunawa sebagai kebijakan turunan di atasnya, yakni Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, karena sudah berlaku mulai dari tahun 2013 maka kebijakan tersebut sudah layak untuk dievaluasi, dan peneliti mengevaluasi dengan menggunakan teori analisis evaluasi kebijakan seperti yang dijelaskan oleh Dunn dalam Nugroho (2014:281) dengan kriteria sebagai berikut :

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Berapa banyak dipergunakan sumberdaya?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kelompok target yang berbeda?
Responsivitas	“Apakah hasil kebijakan tersebut dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?”
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Riant Nugroho. *Public Policy*. 2014. Hal. 281

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan melalui teknik snowball. Untuk mengukur validitas keabsahan data dilakukan suatu teknik pemeriksaan didasarkan pada derajat kepercayaan dan kepastian atas obyek penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber. Dari langkah itu kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisa Miles dan Huberman yang meliputi proses Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Rusunawa dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kota Malang

Kebijakan Rusunawa yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 telah diimplementasikan mulai tahun 2013, sehingga menurut teori Kebijakan Publik milik William N. Dunn kebijakan tersebut termasuk dalam tahap evaluasi kebijakan dengan model evaluasi retrospektif yang menurut teori Dunn dalam Suharto (2012:85-86) bahwa model ini mengevaluasi dampak dari

dilaksanakan kebijakan tersebut. Adapun untuk menjawab fokus Keberhasilan Kebijakan Rusunawa dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang, peneliti menggunakan 3 indikator untuk menjawab fokus yang ada, yakni Efektivitas Kebijakan untuk menjawab apakah kebijakan yang dilaksanakan telah efektif dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang, Pemerataan Kebijakan untuk menjawab apakah kebijakan yang dilaksanakan telah merata atau memenuhi ketepatan sasaran sesuai isi Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2013, serta Responsivitas Kebijakan untuk menjawab bagaimana respon masyarakat khususnya penghuni Rusunawa terhadap diimplementasikannya kebijakan Rusunawa di Kota Malang.

1. Efektivitas Kebijakan Rusunawa dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kota Malang

Kebijakan Rusunawa belum efektif dalam mengatasi permukiman kumuh, dikarenakan masih banyaknya luasan permukiman kumuh yang ada di Kota Malang, selain itu sanksi tegas yang diberlakukan di dalam Rusunawa Buring 1 Kota Malang terlalu ekstrim dan justru kembali menimbulkan permukiman kumuh di Kota Malang, sedangkan untuk pelayanan yang ada di Rusunawa sudah baik dari segi fasilitas, kebersihan, pelayanan administrasi hingga pelayanan teknisi dan keamanan.

2. Pemerataan Kebijakan Rusunawa dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kota Malang

Kebijakan Rusunawa yang telah dilaksanakan oleh UPT Rusunawa Kota Malang belum merata, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang berhak mendapatkan hunian di Rusunawa akan tetapi kuota sangat terbatas, selain itu dari hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa terdapat sebagian masyarakat penghuni Rusunawa Buring 1 Kota Malang tidak mencerminkan benar-benar berasal dari masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sebelumnya berada di permukiman kumuh, melainkan kaum keluarga muda yang belum memiliki tempat tinggal sehingga Rusunawa menjadi pilihan, padahal seharusnya Rusunawa harus benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat yang sebelumnya benar-benar tinggal di permukiman kumuh, sehingga hasil observasi ini menyimpulkan bahwa adanya Rusunawa belum dapat mengatasi permukiman kumuh sepenuhnya, akan tetapi dapat mencegah timbulnya permukiman kumuh di kemudian hari.

3. Responsivitas Kebijakan Rusunawa dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kota Malang

Respon masyarakat penghuni Rusunawa terhadap Kebijakan Rusunawa dari hasil wawancara mayoritas sangat mendukung adanya kebijakan Rusunawa akan tetapi sebagian mengeluh mengenai mahalnya tarif listrik dan air bulanan, selain itu sebagian masyarakat penghuni Rusunawa mengeluh mengenai pola kehidupan sosial yang kurang sehat yakni seringnya terdapat pertikaian, dan hal ini didukung dengan hasil observasi bahwa bahasa tubuh masyarakat penghuni Rusunawa dalam merespon ialah adanya ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Sedangkan respon masyarakat yang ada di kawasan permukiman kumuh di Kota Malang sesuai hasil wawancara ialah lebih memilih untuk tetap bertahan di permukiman kumuh yang mereka huni secara turun-menurun daripada tinggal di Rusunawa dengan alasan biaya lebih murah meskipun sebenarnya sadar dan paham bahwa tanah yang mereka tempati ialah tanah tidak resmi dan harus siap siaga apabila sewaktu-waktu digusur oleh pemerintah, dan hal ini didukung dengan hasil observasi bahwa dalam memberikan respon tersebut masyarakat yang berada di permukiman kumuh merasa tidak bersalah berada di tanah yang tidak resmi, mereka tampak santai dan senang saja untuk tetap bertahan di kawasan kumuh dan ekspresi saat merespon menunjukkan adanya ketidaktertarikan untuk tinggal di Rusunawa Kota Malang.

Faktor Pendukung Keberhasilan Kebijakan Rusunawa dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kota Malang

Adanya dukungan dana yang terus mengalir dari Pemerintah Kota Malang setiap tahunnya untuk membiayai pengelolaan Rusunawa. Selain itu juga adanya partisipasi dari masyarakat secara luas untuk memiliki kesadaran dan berbondong-bondong mendaftar di kependhunian Rusunawa.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kebijakan Rusunawa dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kota Malang

- a. Kurangnya lahan di Kota Malang
- b. Masih kurangnya kucuran dana dari pemerintah pusat
- c. Sebagian masyarakat penghuni Rusunawa kurang disiplin dalam pembayaran sewa bulanan, ada pula yang masih melanggar persyaratan administrasi dengan belum mengurus KTP kependudukan Kota Malang
- d. Seringkali di dalam Rusun terdapat kericuhan yang ditimbulkan permasalahan rumah rumah tangga seperti pertengkaran suami istri, ada juga masyarakat yang kurang mentaati peraturan dengan pulang larut malam dalam kondisi mabuk, padahal di Rusunawa batas jam malam menyesuaikan dengan jam selayaknya di kampung, yakni pukul 21.00 atau 22.00 gerbang sudah ditutup.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan.
- f. Kurangnya partisipasi masyarakat yang ada di kawasan permukiman kumuh untuk beralih ke Rusunawa, dikarenakan faktor kenyamanan untuk tetap tinggal di permukiman yang mereka huni sejak lama dan turun-menurun walaupun bukan tanah resmi milik mereka, dengan konsekuensi sewaktu-waktu harus siap digusur.

KESIMPULAN

Kebijakan Rusunawa di Kota Malang telah berhasil mencegah adanya permukiman kumuh di Kota Malang, akan tetapi belum terlalu berhasil dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian di dalam isi kebijakan Rusunawa terkait persyaratan yang ada dan berdampak pada beratnya beban penghuni Rusunawa yang benar-benar berasal dari kalangan menengah kebawah. Selain itu sanksi yang begitu ekstrim justru turut memicu timbulnya kembali permukiman kumuh di Kota Malang. Sedangkan untuk faktor pendukung kebijakan Rusunawa di Kota Malang ialah adanya partisipasi dan dukungan dari sebagian masyarakat Kota Malang, selain itu adanya dukungan dana dari pemerintah Kota Malang setiap tahun dalam hal pengelolaan Rusunawa. Namun untuk faktor penghambat ialah keterbatasan lahan dan pola hidup sebagian masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan, selain itu kurangnya dana APBD Kota Malang dalam pembangunan Rusunawa dan janji kucuran dana dari pemerintah pusat tidak cair, dan juga kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat yang sejak lama telah mendiami tempat tinggal di kawasan permukiman kumuh dengan berbagai alasan tertentu sangat menghambat keberhasilan kebijakan Rusunawa dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Media Komputindo.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang

Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Internet

Afandi, Ahmad Syaiful. 2014. *Rusunawa Buring II Segera Menyusul*. Media Center Kendedes.(online),(<http://mediacenter.malangkota.go.id/2014/04/rusunawa-buring-ii-segera-menyusul>), pada 11April 2014.